

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**IRSAN GUSFRIANTO
NPM. 0771010126**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)

Disusun oleh :

IRSAN GUSFRIANTO
0771010120

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 27 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1.

Haryo Sulistiyantoro.SH.,MH
NIP. 19620625 199103 1 001

(.....)

2.

Subani.SH.,MSi
NIP. 19510504 198303 1 001

(.....)

3.

Mas Anienda Tien F.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

(.....)

Mengetahui
Dekan

HARYO SULISTIYANTORO.SH.,MH
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)

Disusun oleh :

IRSAN GUSFRIANTO
0771010120

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 27 Juni 2012

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

Haryo Sulistiyantoro.SH., MH
NIP. 19620625 199103 1 001

Haryo Sulistiyantoro.SH., MH
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

Subani.SH., MSi
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Mas Anienda Tien F., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui
Dekan

HARYO SULISTIYANTORO. SH., MH
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL
INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI
(Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)

Disusun oleh :

IRSAN GUSFRIANTO
NPM. 0771010126

Menyetujui

Pembimbing

HARYO SULISTIYANTORO, S.H., M.H
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, S.H., M.H
NIP. 19620625 199103 1 001

PUTUSAN
Nomor : PUT/215 – K / PM.III - 12 / AL / XI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III - 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ahmad Sujarot
Pangkat /Nrp : Pratu Mar / 104493
J a b a t a n : Anggota Klma 1 Mar
K e s a t u a n : Menart 1 Mar
Tempat, tanggal Lahir : Rembang, 2 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki - lak i
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess TD Kima Menart 1 Mar Karangpilang Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan .

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Menart 1 Mar selaku PAPERA Nomor : Kep / R / 14 / X / 2009 tanggal 9 Oktober 2009.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III - 12 Surabaya Nomor : Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini .

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 3 (t i g a) bulan

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500, - (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa :

Barang- barang :

1 (satu) buah Helm Standar warna hitam milik pratu Mar A Sujarot NRP. 104493.

Agar di rampas.

Surat - surat :

- 1 (sa tu) lembar Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/ I I / 2 009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang di tanda tangani oleh Dokter Syarwani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini .

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesalkan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III - 12 Surabaya Nomor : Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat - tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000 setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Jl . Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III - 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel . II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan di tempatkan di Yonarhanud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimuat asikan ke Kima Menart - 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantarkan Sdri . Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L- 4760- VO.

Bahwa setelah sampai disekitar Monkasel Surabaya, Terdakwa bermaksud masuk ke sela-sela mobil, pada saat yang bersamaan Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) juga bermaksud masuk ke sela - sela mobil yang sama sehingga stang sepeda motor Terdakwa dan stang sepeda motor Saksi - 1 saling bersenggolan sehingga Saksi - 1 oleng dan hampir terjatuh.

Bahwa setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) menyuruh Terdakwa berhenti di sisi kanan jalan tepatnya di Jl . Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi - 1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu saksi - 1 bertanya “kamu dari satuan mana” namun tidak dijawab oleh Terdakwa maka Saksi - 1 bertanya lagi “ Pangkatmu apa” tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi - 1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri

Saksi - 1.

Bahwa Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu diatrik ke belakang kemudian kearah pelipis Saksi - 1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi - 1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar oleh Sdr . Mulyo Pramujianto (Saksi - 2) yang berada di depan pos Security RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ±50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi - 1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi - 1 sempat melihat nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L- 4760- VO.

Bahwa pada saat Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi - 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak ± 0,5 M dan Saksi - 1 tidak melakukan perlawanan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mongering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/ I I / 2 009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang di tandatangani oleh Dokter Syarwani.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercan tum dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Yoga Sugama, S.H. Letda Mar NRP 19077/P.
2. Nur Yahya, S.H. Serda Mar NRP 78407.
3. Bahfid, S.H. Serda Mar NRP 78483.
4. Zainur Rofiq Serda Mar NRP 78498.

Sesuai Surat Perintah dari Danmen Artl Mar Nomor : Spr in /435 /XI / 2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tert anggal 13 Nopember 2009.

Menimbang : Didalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi :

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer kabur tidak jelas karena dalam dakwaan tidak diuraikan secara cermat dan je l as tentang kejadian yang sebenarnya, sedangkan korban hanya

menderita luka robek dan luka lecet dan sudah mengering pada dahi kiri yang disebabkan oleh sentuhan benda tumpul, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan jabatan atau pekerjaan sehingga Oditur salah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang seharusnya dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 352 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut datas Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima Eksepsi yang kami ajukan.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur kabur dan batal demi hukum.
3. Menyatakan sidang hari ini batal.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Tanggapan Eksepsi Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat formil maupun materiil surat dakwaan telah memuat identitas lengkap Terdakwa, dan surat dakwaan telah di tanda tangani dan diberi tanggal surat dakwaan telah disusun secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Atas uraian tersebut diatas Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk :

Menolak Nota Eksepsi yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Menerima seluruh uraian surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Memeriksa Terdakwa Pratu Mar Ahmad Sujarot NRP 104493 dengan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Atas Eksepsi Penaehat Hukum dan tanggapan Eksepsi Oditur Militer Pengadilan Militer III – 12 Surabaya, memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) Yoga Sugama, S.H. Letda Mar NRP 19077/P, Nur Yahya, S.H. Serda Mar NRP 78407. Bahf id, S.H. Serda Mar NRP 78483 dan Zainur Rof iq Serda Mar NRP 78498 selaku Penaehat Hukum tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/286/K/AL /X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Ahmad Sujarot Pratu Mar NRP 104493 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya sewaktu Penyidikan telah disumpah, didalam persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum serta Oditur Militer telah setuju untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Saksi – 1 : Nama : Endra Randa Layuk, Pangkat /NRP : Letda Laut (P) /18687/P, Jabatan : Pama KRI Teluk Bayur - 502, Kesatuan KRI Teluk Bayur - 502, Tempat / tg l. lahir : Ujung pandang, 5 Pebruari 1985. Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki – lak i, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : TD KRI Teluk Bayur – 502.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jl . Pemuda tepatnya di depan Delta, Saksi mencoba masuk diantara sela – sela mobil, ternyata ada kendaraan Yamaha Vixion juga ngotot dengan menambah gas untuk masuk sela – sela mobil yang akan Saksi masuk sehingga stangstir sebelah kirinya menyanggol stir bagian kiri Saksi yang menyebabkan Saksi oleng hampir terjatuh.

Bahwa setelah bersenggolan tersebut kemudian Saksi menyuruh berhenti motor yang menyanggol Saksi di sisi kanan jalan tepatnya di depan kantor Bank BTN Surabaya di jalan Pemuda, setelah berhenti kemudian Saksi dan Terdakwa sama- sama turundari sepeda motor lalu Saksi ber tanya “kamu dari satuan mana” namun tidak dijawab maka Saksi bertanya lagi “pangkatmu apa” tetapi Terdakwa juga tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2 kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi, setelah memukul Terdakwa langsung pergi dan Saksi sempat melihat Nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yai tu L- 4760- VO.

Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak $\pm 0,5$ M dan Saksi tidak melakukan perlawanan.

Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut Saksi sampai dengan sekarang sering merasa pusing-pusing namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

Kronologis kejadiannya tidak benar, yang benar yaitu Saksilah yang menyalip Terdakwa dengan cara zigzag dan akan menendang Terdakwa tetapi tidak kena.

Saksi - 2 : Nama : Mulyo Pramujianto, Pekerjaan : Swasta,

Tempat / tg l. lahir : Bojonegoro, 7 Oktober 1978,

Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal :

Jl .Rajekwesi RT. 003 RW. 01 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009 sekira pukul . 22.00 Wib di Jl . Raya depan sebelah kanan RBS (Royal Bank Of Scot land) di Jl . Pemuda Surabaya Saksi melihat 2 buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Tiger (terakhir Saksi ketahui sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat perwira bernama Bpk. Endra) berhenti, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai Yamaha Vixion menghampiri pengendara sepeda motor Tiger, setelah itu melepas helm teropong warna hitam dan dipegang dengan tangan kanan, lalu Saksi melihat helm tersebut dipukul ke arah muka dari pengendara sepeda motor Honda Tiger sebanyak 2 kali.

Bahwa pengendara Yamaha Vixion tersebut memukul dengan cara menarik terlebih dahulu helm yang dipegang ke arah belakang kemudian helm tersebut diayunkan ke arah wajah Bpk. Endra sebanyak 2 kali yang mengenai pelipis kiri, pukulan tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sampai terdengar oleh Saksi.

Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Bpk. Endra tidak melakukan perlawanan/tidak membalas.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di depan Pos Security RBS dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter, di depan pos tersebut tidak ada pagarnya dan hanya ada rantai sehingga pandangan Saksi ke arah kedua orang tersebut bebas tanpa terhalang sesuatu.

Bahwa akibat pukulan kejadian tersebut, yang Saksi ketahui sewaktu Saksi bertemu dengan Bpk. Endra sekitar empat hari setelah kejadian, Saksi melihat di pelipis kiri Bpk. Endra ada bekas luka berwarna hitam ± 2 Cm, namun luka tersebut sudah kering.

Atas keterangan Saksi - 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian yang lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa hanya memukul pakai helm satu kali, helmnya bukan helm teropong tetapi helm standar.

Saksi melakukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan Diklatam PK 23 Gel . I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonarhanud- 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart - 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menggunakan Penasehat Hukum dari Kima Menart - 1 Mar An. Let tu Laut (KH) Ar ie f Hadyatn i, SH NRP. 17614.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 sekira pukul . 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok baru saja makan malam di Ikan Bakar Sunda, setelah itu Terdakwa bermaksud mengantarkan Sdri. Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L- 4760- VO.

Bahwa setelah sampai disekitar Monkasel Surabaya, Terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor Honda Tiger (Letda Laut Endra) mengendarai sepeda motornya dengan Zig Zag, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mendahului dan berhasil, setelah itu Letda Laut Endra kembali mendahului Terdakwa namun pada saat itu stang motor Terdakwa dan Letda Laut Endra berbenturan yang mengakibatkan kan sepeda motornya sama-sama oleng setelah itu Letda Laut Endra berusaha menendang Terdakwa namun Terdakwa bisa mengelak kemudian Letda Laut Endra berteriak menyuruh Terdakwa untuk berhenti.

Bahwa pada saat Terdakwa memukul pengendara sepeda motor Honda Tiger (Letda Laut Endra) tersebut, pengendara sepeda motor Honda Tiger tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau pengendara sepeda motor Honda Tiger tersebut adalah seorang Perwira.

Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Letda Laut Endra sempat bertemu, yang pertama di rumah Serka Mar Maryono untuk kesepakatan damai dan meminta maaf, pertemuan kedua pada tanggal 25 Pebruari 2009 di Kima Menart - 1 Mar dan dari pertemuan tersebut ada kesepakatan damai antara Komandan KRI dengan Dankima Menart - 1 Mar, juga Terdakwa dan Letda Laut Endra.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam milik Pratu Mar A. Sujarot NRP 104493.

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Reper tum No. 26/VIS/RSA/ I I / 2 009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditanda tangani oleh Dokter Syarwani.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel . II di Kodika I Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan di tempatkan di Yonarhanud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart - 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantarkan Sdri. Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L- 4760- VO.

3. Bahwa benar awal kejadiannya saat Terdakwa mengantar Sdri Denok, di perjalanan sepeda motor Terdakwa disalip oleh Saksi - 1 (Letda Endra Randra Layuk) dengan menggunakan sepeda motor Tiger dengan cara zig - zag memotong sepeda motor Terdakwa, karena di salip dengan cara zig- zag Terdakwa ganti mengejar dan mendahului sepeda motor Saksi - 1, sampai didepan Monkasel Terdakwa dan Saksi - 1 sama- sama mau masuk diantara mobil tetapi antara Terdakwa dengan Saksi - 1 setirnya saling bersenggolan, setelah bersenggolan Saksi - 1 menendang sepeda motor Terdakwa yang sedang berjalan tetapi tidak kena.

4. Bahwa benar setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) menyuruh Terdakwa berhenti disisi kanan jalan tepatnya di Jl . Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi - 1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi - 1 bertanya "kamu dari satuan mana" namun tidak dijawab oleh Terdakwa maka Saksi - 1 bertanya lagi " Pangkatmu apa" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi - 1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2(dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi - 1.

5. Bahwa benar Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu diatrik ke belakang kemudian diayunkan ke arah pelipis Saksi - 1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi - 1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar oleh Sdr. Mulyo Pramujianto (Saksi - 2) yang berada di depan pos Security RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ±50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi - 1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi - 1 sempat melihat nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L- 4760- VO.

6. Bahwa benar pada saat Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi - 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi - 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak ± 0,5 M dan Saksi - 1 tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mengering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/ I I / 2 009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al I r s yad Surabaya yang ditanda tangani oleh Dokter Syarwani.

8. Bahwa benar kejadian tersebut diakibatkan karena arogansi pengendara sepeda motor Tiger yaitu Saksi - 1 (Letda Laut Endra) menyal i p sepeda motor Terdakwa secara zig - zag dan setelah bersenggo lan Saksi - 1 berusaha menendang sepeda motor Terdakwa namun tidak kena, sehingga memancing emosi Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi - 1 telah mengadakan pertemuan untuk kesepakatan tidak saling mengadu yaitu di rumah Serka Mulyono pada tanggal 25 Pebruari 2009 yang kedua di Kima Menart, yang hadir saat itu Komandan KRI, Saksi - 1, Dan Kima Menart I Mar dan Terdakwa, kedua Satuan telah mengadakan perdamaian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tun tu tanya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pr ins i pnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur - unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntu tanya, namun mengenai penja tuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena pledoi Penasehat Hukum disampaikan secara lisan yang isinya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur – unsur sebagai berikut Unsur ke – 1: “ Barang siapa “

Unsur ke – 2 : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke- 1 “ Barang siapa ” ,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ber laku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel . I I di Kodika I Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan di tempatkan di Yonarhanud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart - 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.

b. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.

c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

d. Bahwa benar di Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di Persidangan tidak di temukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.

e. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat Bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke- 1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit,

seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dsb. Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri . Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantarkan Sdri . Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L- 4760- VO.

b. Bahwa benar awal kejadiannya saat Terdakwa mengantar Sdri Denok, di per ja l anan sepeda motor Terdakwa disa l i p oleh Saksi - 1 (Letda Endra Randra Layuk) dengan menggunakan sepeda motor Tiger dengan cara zig – zag memotong sepeda motor Terdakwa, karena di sal i p dengan cara zig- zag Terdakwa ganti mengejar dan mendahulu i sepeda motor Saksi - 1, sampai didepan Monkasel Terdakwa dan Saksi - 1 sama- sama mau masuk diantara mobil tetapi antara Terdakwa dengan Saksi – 1 setirnya saling bersenggolan, setelah bersenggolan Saksi - 1 menendang sepeda motor Terdakwa yang sedang berjalan tetapi tidak kena.

c. Bahwa benar setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) menyuruh Terdakwa berhenti disisi kananjal an tepatnya di Jl . Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi - 1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi - 1 ber tanya “kamu dari satuan mana” namun tidak di jawab oleh Terdakwa maka Saksi - 1 ber tanya lag i “

Pangkatmu apa” tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi - 1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2(dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi - 1.

d. Bahwa benar Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu diatrik ke belakang kemudian diayunkan ke arah pelipis Saksi - 1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi – 1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar oleh Sdr. Mulyo Pramujianto (Saksi - 2) yang berada di depan pos Security RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ±50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi - 1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi - 1 sempat melihat nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L- 4760- VO.

e. Bahwa benar pada saat Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi - 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak ± 0,5 M dan Saksi - 1 tidak melakukan perlawanan.

f . Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (Saksi - 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mongering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSa/ I I / 2 009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Saki t Al Irsyad Surabaya yang di tanda tangani oleh Dokter Syarwani.

g. Bahwa benar kejadian tersebut diakibatkan karena arogansi pengendara sepeda motor Tiger yaitu Saksi - 1 (Letda Laut Endra) menyalip sepeda motor Terdakwa secara zig - zag dan setelah bersenggolan Saksi - 1 berusaha menendang sepeda motor Terdakwa namun tidak kena, sehingga memancing emosi Terdakwa.

h. Bahwa benar setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi - 1 telah mengadakan pertemuan untuk kesepakatan tidak saling mengadu yaitu di rumah Serka Mulyono pada tanggal 25 Pebruari 2009 yang kedua di Kima Menart, yang hadir saat i tu Komandan KRI, Saksi - 1, Dan Kima Menart I Mar dan Terdakwa, kedua Satuan telah mengadakan perdamaian.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal - hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa dari tindakan Terdakwa adalah akibat Terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya mudah emosi dan mudah tersinggung oleh orang lain karena Terdakwa gengsi di depan wanita yang diboncengnya maka Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi - 1, akibat pemukulan Terdakwa, Saksi - 1 menderita luka di dahi

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang.

Upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Terdakwa dan Kesatuannya maupun Kesatuan Saksi korban.

Hal - hal yang memberatkan :

Perkara Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat dirasa lebih bermanfaat dari pada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak mengganggu kepentingan Militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah helm standar warna hitam milik Pratu Mar A. Sujarot NRP 104493.

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Reperitum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Alir Syad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 14 a KUHP. Pasal 15 KUHPM. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.

Dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan

Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ahmad Sujarot, Pratu Mar NRP 104493; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ .

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan, Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa tindak pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) buah helm standar warna hitam milik Pratu Mar A.

Sujarot NRP 104493.

Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Angkoso W, S.H., M.H. Letnan Kolone I Laut (KH) NRP 10565 / P sebagai Hakim Ketua serta M.P. Lumbanradja, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan

Diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H. Mayor Chk NRP 548430 dihadiri oleh Para Penasihat Hukum Yoga Sugama Letda Mar NRP 19077/P, Bahfid, S.H Serda Mar NRP 78483 dan Panitera Karsedi, S.H Kapten Chk NRP 636227 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / tanda

Bambang Angkoso W, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 10565 / P

Hakim Anggota I,

tanda

M.P. Lumbanradja, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota II,

tanda

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 574161

Panitera,

tanda

Karsedi, S.H
Kapten Chk NRP 636227

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang tak henti-hentinya memberikan nikmat, karunia kepada setiap hambahnya. Hanya kepada-Nyalah rasa syukur patut dipanjatkan atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: “Pertanggung Jawaban Pidana OKNUM Tentara Nasional Indonesia Yang Menganiaya Sesama Anggota TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)”. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti patutlah kiranya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” Jatim yang juga merangkap selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi.
2. Bapak H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku WADEK I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” Jatim.
3. Drs. E.C Bapak Gendut Soekarno MS selaku WADEK II fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”Jatim.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”Jatim.
5. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen di Progdil Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”Jatim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

6. Seluruh staf TU Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”Jatim yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa.
7. Bapak Alamsyah Nasution, dan Ibu Sri Rahayu Dona, sebagai orang tua yang selalu memberikan pelajaran mengenai arti sebuah kehidupan serta tak henti-hentinya memberikan bantuan baik secara moril maupun materil dan doa.
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”Jatim.yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sungguh peneliti harapkan saran dan kritik yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum.

Surabaya, Juli 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI ..	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR PUSTAKA	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	5
1.2. Rumsuan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tindak Pidana	10
1.5.2. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 351	11
KUHP	
1.5.3. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	13
Dilihat dari KUHP Militer	24

1.5.4. Tugas Hakim dan bentuk Putusan	44
1.6. Metode Penelitian	45
1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	45
1.6.2. Metode Pendekatan Masalah	46
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	46
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	47
1.7. Sistematika Penulisan	48
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN MILITER YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS KASUS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SESAMA ANGGOTA	50
2.1. Kronologi Kasus	50
2.2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan	52
2.3. Analisis Pertimbangan Hukum	55
BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA ODITUR ATAS PIDANA PERCOBAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	59
3.1. Upaya Hukum yang dapat di lakukan Jaksa Oditur Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Anggota Militer.....	59
3.2. Tindak Pidana oleh Terdakwa Militer Dengan Pidana	

	Bersyarat.....	74
BAB IV	PENUTUP	79
	4.1. Kesimpulan	79
	4.2. Saran.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
- SURAT PENGANTAR WAWANCARA KE PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- HASIL WAWANCARA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- SALINAN PUTUSAN NOMOR: PUT/215-KPM.III-12/AL/XI/2009

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN ” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : IRSAN GUSFRIANTO
Tempat Tanggal Lahir: Raha, 15 Agustus 1987
NPM : 0771010126
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus
Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)

ABSTRAKSI

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui, menganalisis pertimbangan hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana militer dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum. Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Langkah pembahasan dilakukan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menurut pengamatan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yuridis. Sebenarnya pidana yang dijatuhkan bukan pidana bersyarat melainkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan agar citra kesatuan militer di mata masyarakat tetap baik dan bagi pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatanya lagi. Dalam kasus penganiayaan sesama anggota Tentara Nasioanal Indonesia yang di pidana bersyarat, jaksa oditur seharusnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Militer III-12 Surabaya, tetapi jaksa oditur tidak melakukan upaya hukum banding.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Upaya Hukum, Pengadilan Militer.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRSAN GUSFRIANTO

Tempat Tanggal lahir : Raha, 15 Agustus 1987

NPM : 0771010126

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Rungkut Asri Timur RK/5 Blok C-38, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009), dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta saya sendiri. yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya, dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Surabaya, Juni 2013

Dosen Pembimbing

HARYO SULISTIYANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19620625 199103 1 001

IRSAN GUSFRIANTO
NPM : 0771010126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI), namun tidak memberikan definisi mengenai TNI. Pada Konsideran UU TNI disebutkan bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Peran, fungsi dan tugas TNI diatur dalam beberapa pasal dalam UU TNI. Pasal 5 UU TNI mengenai peran TNI menentukan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan fungsi dari TNI bahwa TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai di antaranya penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara sebagaimana pasal 6 UU TNI.

Sehubungan dengan tugas TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan operasi militer untuk perang; operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar

negeri; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU TNI.

Angkatan Darat bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Sebagai anggota pengamanan nasional atau negara, TNI tidak luput dari tindakan yang melanggar hukum pidana. TNI yang melakukan pelanggaran pidana, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer. Pengadilan Militer diatur dalam KUHP Militer. Pada pasal 4 KUHP

Militer disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain dari pada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

1. Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;
2. Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer sebagaimana diatur dalam pasal 5 KUHP Militer. Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah Pidana-pidana utama:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946). Pidana-pidana tambahan:
 - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

- b. Penurunan pangkat;
- c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Anggota TNI melakukan penganiayaan terhadap sesama anggota TNI yang mengakibatkan korban luka, Pengadilan Militer Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan kepada pelaku berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Sebagai suatu penegak hukum seharusnya lebih berat, namun kenyataannya hanya dihukum dengan percobaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan militer yang menjatuhkan putusan atas kasus penganiayaan yang dilakukan sesama anggota?
2. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana militer.

2. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat praktis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang selama ini diperoleh secara teoritis, khususnya pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan teman sejawatnya.

2. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan teman sejawat yang dilakukan oleh oknum TNI.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Sianturi mengatakan tindak pidana berasal dari istilah Belanda “*strafbare feid*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹

Mengenai “*strafbare feid*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".² Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.³

Apabila diperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum

¹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, , Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 204.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

³*Ibid.*, h. 1.

pidana. Karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Perihal kesalahan yang menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban ini dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan

3) kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).⁴

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Dengan sengaja menurut Moeljatno mengemukakan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat meng-hendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.⁵

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-Undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggar ketentuan Undang-Undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah Undang-Undang saja, di samping Undang-Undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan

⁴Ibid., h. 177.

⁵Ibid.

yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Sehubungan dengan sifat melawan hukum formal dan materiil, Moeljatno mengemukakan: *Formeel delict* juga disebut delik dengan perumusan formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. *Materieel delict* juga disebut delik dengan perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.⁷

Sehubungan dengan unsur subyektif dalam tindak pidana penipuan ialah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.⁸ Sedangkan unsur obyektifnya yaitu barang siapa. Kata “barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan tersebut”.⁹

1.5.2. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP menentukan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

⁶Ibid., h. 130.

⁷Ibid.

⁸PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, h. 144.

⁹ Ibid., h. 144.

Di dalam rumusan pasal 351 (1) tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja.¹⁰

Perbuatan itu misalnya menempeleng kepala. Walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sebaliknya melukai jari kelingkung seorang pemain biola, walaupun kecil sekali, namun apabila perbuatan itu menyebabkan si pemain biola tidak dapat bermain orkes, satu-satunya profesi yang dapat ia jalankan, tidak dapat digolongkan sebagai penganiayaan ringan.

Pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai kejahatan, yang berarti bahwa rasa sakit yang diderita oleh seseorang disebabkan karena tindakan orang lain dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sianturi sebagai berikut: “Unsur kesalahan disini harus dengan sengaja”.¹¹ Unsur kesengajaan merupakan suatu hal pokok dalam hukum pidana yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perihal perbuatan melawan hukum, Moeljatno membedakan-nya antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukum perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan

¹⁰ Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung,, 1989, h. 102.

¹¹ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni KHM. PTHM, Jakarta, 1989, h. 503.

hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Pelaku dengan sengaja membuat luka seseorang, sehingga sejak semula adalah merupakan suatu tujuan dari pelaku sengaja agar luka-luka terjadi. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Oleh karena dilakukan dengan sengaja, berarti pelaku mengetahui bahwa tindakannya tersebut dilarang, namun tetap juga melakukannya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sianturi sebagai berikut:

Dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek dan sebagainya. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari si petindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang.¹³

Mengenai hal ini dipertegas oleh Moch. Anwar sebagai berikut:

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk atau mengiris dengan

¹²Ibid., h. 130.

¹³S.R. Sianturi, Loc. Cit.

alat-alat tajam. Di samping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.¹⁴

Meskipun penganiayaan pada Pasal 351 KUHP termasuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, tidak berarti terhadap pelakunya akan dijatuhi pidana, karena sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi sebagai berikut:

Unsur bersifat melawan hukum yang kita anut dalam rangka penerapan hukum pidana memaksa kita harus selalu mengadakan penilaian apakah tindakan subjek bersifat melawan hukum atau tidak. Seorang ayah pada dasarnya sampai suatu tingkat tertentu dipandang berwenang "menghajar" anaknya yang nakal. Karenanya dipandang bahwa tindakannya itu tidak bersifat melawan hukum. Sudah barang tentu, apabila melampaui kewajaran maka kepadanya diterapkan Pasal 356. Sampai sejauhmana batas-batas dari kewajaran itu haruslah diselesaikan secara kasuistik.¹⁵

1.5.3. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Diilihat Dari KUHP

Militer

Hukum Pidana Militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

Hukum Pidana Formal yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

¹⁴ Moch. Anwar, Tindak Pidana Kejahatan (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1989, h. 12.

¹⁵ S.R. Sianturi, Op. Cit., h. 503-504 .

Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana militer.¹⁶

Di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal adanya Peradilan Militer, yang berarti bahwa meskipun pelaku adalah warga negara Indonesia jika pelaku adalah anggota militer, jika melakukan tindak pidana diadili oleh pengadilan militer.

Hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan adalah merupakan bagian dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Karenanya hukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.

Landasan Hukum Militer Indonesia adalah :

- 1) Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
- 2) UUD'45;
- 3) Sapta Marga;
- 4) Sumpah Prajurit dan
- 5) Doktrin-doktrin militer Indonesia (antara lain Catur Dharma Eka Karma, Doktrin Operasi Keamanan Dalam Negeri/OPSKAM; DAGRI, Doktrin Operasi Pertahanan/OPSHAN dan lain-lain).

Sumber-sumber formalnya adalah:

- 1) UUD, UU dan peraturan-peraturan lainnya;
- 2) Adat dan kebiasaan-kebiasaan (custom and usages);
- 3) Perjanjian-perjanjian internasional;

¹⁶ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 26

- 4) Putusan-putusan hakim;
- 5) Doktrin-doktrin militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi:

- 1) Hukum disiplin Militer;
- 2) Hukum Pidana Militer;
- 3) Hukum Acara Pidana Militer;
- 4) Hukum Kependidikan Militer;
- 5) Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;
- 6) Hukum Administrasi Militer;
- 7) Hukum Internasional (Hukum perang)/Hukum Sengketa Bersenjata;
- 8) Hukum Perdata Militer.

Cara ini lebih banyak digunakan oleh mereka yang justru sudah merupakan sarjana/ahli-ahli hukum dalam rangka mengembangkan hukum militer. Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

1. Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;
2. Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan-jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran-jabatan sedemikian itu, atau

suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai tempat berlakunya ketentuan pidana (dalam perundang-undangan) yang diatur dalam KUHP, ternyata di KUHP Militer diperluas bagi seorang militer. Perluasan tempat tersebut dikaitkan dengan beradanya seseorang militer di luar Indonesia dalam dua hal, yaitu:

1. Beradanya ia di tempat itu di dalam hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana, atau
2. Beradanya ia di tempat itu di luar hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana tertentu;

Pengertian di luar Indonesia adalah lebih luas dari pada di luar negeri. Di luar Indonesia berarti di suatu tempat yang tidak termasuk wilayah Indonesia. Tidak menjadi persoalan apakah tempat/daerah itu “bertuan” atau “tak bertuan” (misalnya: Lautan bebas). Bilamana ia di suatu daerah yang tidak dikuasai oleh suatu hukum/negara, melakukan suatu kejahatan, tidak banyak persoalan mengenai penerapan hukum Indonesia baginya. Tetapi bila dilakukan di luar negeri di mana hukum “luar negeri” itu mengikat setiap orang di Negeri tersebut termasuk oknum-oknum militer kita yang sedang berada di situ, dapat dipersoalkan mengenai hukum mana yang akan diterapkan.

Diadakannya ketentuan pasal 4, tidak dimaksudkan supaya militer kita tersebut tidak mengakui kekuatan mengikat dari hukum negara di mana ia berada. Maksud utama dari pasal 4 ialah agar hakim militer Indonesia, dapat menerapkan undang-undang hukum pidana kepada militer kita tersebut. Selanjutnya dimaksudkan pula agar hakim-hakim militer Indonesia, dapat

menerapkan undang-undang hukum pidana kepada militer kita tersebut. Selanjutnya dimaksudkan pula agar hakim-hakim militer Indonesia pada suatu mahkamah militer Indonesia apabila sedang bertugas di luar Indonesia (misalnya sebagai suatu bagian dari induk pasukan yang ditugaskan di luar negeri) dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim militer Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Atas dasar ketentuan ini maka juga dikatakan bahwa seseorang militer selalu membawa hukum (negaranya) ke manapun ia pergi.

Dengan demikian titik berat untuk menentukan batas-batas berlakunya ketentuan pidana Indonesia bagi seseorang militer Indonesia adalah pribadi (persoon) dari militer tersebut. Asas yang digunakan adalah asas personalitas. Apakah negara asing tersebut akan menggunakan wewenangnya untuk mengadili perkara militer tersebut. Asas yang digunakan adalah asas personalitas. Apakah negara asing tersebut akan menggunakan wewenangnya untuk mengadili perkara militer kita itu sepenuhnya, tergantung kepada mereka. Dalam hal mereka menggunakan wewenang tersebut, maka berlakulah asas *non bis in idem* (ps 76 KUHP). Dan apabila misalnya hanya di “*persona non grata*” kan saja, maka ketentuan pasal 4 dapat diterapkan oleh badan-badan peradilan militer Indonesia.

Yang dimaksud dengan tindak pidana di sini, adalah suatu tindakan yang menurut ketentuan pidana Indonesia dapat dipidana. Tidak dipersoalkan apakah tindakan tersebut juga di luar negeri merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Artinya walaupun di negeri di mana ia berbuat tindakan itu bukan merupakan tindak pidana, tetapi oleh negara Indonesia ditentukan sebagai

tindak pidana, maka oknum militer tersebut tetap dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia. Jadi pengertian istilah tindak pidana di sini, sekaligus juga merupakan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 5 (1) ke-2 KUHP yang mensyaratkan bahwa yang ditentukan sebagai tindak pidana kejahatan di Indonesia harus juga merupakan tindak pidana di negara yang bersangkutan.

Namun dalam penerapan hukum pidana Indonesia tersebut di luar negeri, dalam hal-hal tertentu akan dihadapkan dengan sesuatu kesulitan, bilamana suatu ketentuan tindak pidana itu bersifat nasional atau kedaerahan.

Bukankah undang-undang hukum pidana Indonesia tidak dimaksudkan supaya berlaku secara Internasional. Demikianlah misalnya jika seseorang anggota TNI dengan sengaja memasukkan sesuatu meterai, tanda atau merek yang palsu ke negeri asing, di negara mana ia sedang berada, sukar diterapkan ketentuan pasal 257 KUHP, karena pasal ini mensyaratkan secara tegas; memasukkan ke Indonesia.

Dihubungkan dengan situasi, ketentuan ini menggunakan perumusan yang luas karena tidak merumuskan dalam situasi mana tindak pidana tersebut terjadi. Dengan perkataan lain ketentuan ini berlaku baik dalam keadaan damai (tertib sipil) maupun dalam keadaan perang (darurat).

Di dalam hubungan dinas berarti bahwa beradanya dia di luar negeri itu adalah karena melakukan suatu dinas. Dalam hal ini pengertian dinas adalah 24 jam sehari. Jika seseorang militer ditugaskan ke luar negeri misalnya untuk melakukan penelitian pembuatan suatu jenis senjata di suatu pabrik, sementara

ia sedang tidak melakukan penelitian tersebut, (sebutlah sedang berlibur pada hari Minggu) ia melakukan suatu tindak pidana, maka ketentuan ini dapat diterapkan kepadanya. Jadi yang ditekankan ialah dalam rangka apa ia berada di luar negeri.

Di luar hubungan dinas berarti bahwa beradanya dia di luar negeri bukan karena sedang melakukan dinas. Dalam hal ini pengertian dinas dianut dalam arti yang terbatas yaitu tidak sedang melakukan suatu perintah, tugas militer (mission) atau suatu kewajiban militer. Dalam arti luas, cuti itu sebenarnya termasuk pengertian di luar hubungan dinas. Namun walaupun militer tersebut beradanya di luar negeri di luar hubungan dinas dalam hal-hal melakukan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 4 ke-2, ketentuan Hukum Pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya.

Pasal 5, bahwa Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer.

Secara umum ketentuan-ketentuan ini merupakan perluasan dari asas nasional pasif atau asas perlindungan ditinjau dari sudut kepentingan negara yang harus dilindungi. Dengan demikian ketentuan ini merupakan perluasan dari pasal 4 ke-1, ke-2 bagian akhir dan ke-3 KUHP.

Ia juga merupakan “extra personaliteits beginsel” atau “extra territorialiteitsbeginsel”, apabila ditinjau dari sudut justisiabel dan dari sudut rialiteitsbeginsel”, apabila ditinjau dari sudut justisiabel dan dari sudut

persidangan Mahkamah Militer yang sedang bertugas di luar negeri. Bukan saja terhadap delik-delik yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 4 KUHP, tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk justisiabel peradilan militer. Tolak pangkal ketentuan ini adalah melindungi kepentingan negara. Selain dari pada itu juga demi memungkinkan pelaksanaan tugas militer dengan baik dan melindungi kepentingan-kepentingan militer lainnya (extra beschermingsbeginsel).

Ketentuan ini memberi kemungkinan bagi badan-badan peradilan militer yang sedang bertugas di luar Indonesia untuk melaksanakan tugasnya yang justisiabel-nya adalah “siapa” saja, dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu ini antara lain adalah:

- a. Di suatu daerah di luar Indonesia yang dikuasai oleh TNI, dalam keadaan perang, baik penguasaan itu dalam rangka “kerjasama” internasional, maupun dalam rangka pelaksanaan doktrin TNI yang disebut ofensif defensif, yaitu mendahului menyerang musuh yang sudah nyata-nyata hendak menyerang kita, tanpa berarti mempunyai ambisi untuk ekspansi wilayah;
- b. Di suatu daerah di luar Indonesia yang tak bertuan (niemands land) dalam keadaan perang, dalam rangka tersebut di atas.

Ketentuan seperti tersebut di atas belum diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer kita. Demikian juga peraturan-peraturan yang memungkinkan badan-badan peradilan militer untuk berfungsi di suatu daerah RI yang karena keadaan (darurat) begitu gawatnya sehingga badan-badan peradilan umum tak

dapat berfungsi (pada tingkat pertama). Dengan akan diadakannya ketentuan seperti termaksud, berarti bahwa badan-badan peradilan militer berdasarkan undang-undang hukum acara pidana militer akan dapat melakukan fungsinya, sebagai kelanjutan dari pasal 5 KUHP Militer. Hukum pidana material yang digunakan/diterapkan adalah ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia.

Sebagaimana diketahui macam tindakan pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

Jenis-jenis tindak pidana militer yang diatur dalam KUHP Militer adalah

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

1) Pengertian Tindak Pidana Militer Murni

Adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHP Militer yaitu:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja:

1. : (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan Darat, Angkatan Laut, angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan

segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

- 1) Kejahatan desersi sebagaimana diatur Pasal 87 KUHP Militer yaitu:

Ayat 1 : diancam karena desersi, militer;

- 1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- 2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- 3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Ayat 2 : Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat 3 : Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

- 2) Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHP Militer yaitu :
 - (1) penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

b. Tindak Militer Campuran (Gemengde Militaire Delict)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu

berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Contoh :

- Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang.
Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHP Militer.
- Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP Militer.

Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHP Militer secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum

Pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.¹⁷

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus¹⁸ Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya.

Di dalam Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Di dalam KUHP Militer hanya mengatur mengenai tindak pidana dalam arti formal, mengenai tindak pidana materiilnya tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP.

Hal ini sesuai dengan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yakni undang – undang yang khusus mengalahkan undang – undang yang umum. Akan tetapi karena dalam undang – undang yang khusus yakni KUHP Militer tidak mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana penganiayaan. Maka penegakan Hukum Khususnya Hakim Wajib melihat pada aturan yang umum, yakni dalam hal ini KUHP.

1.5.4. Tugas Hakim dan Bentuk Putusan

¹⁷ Ibid., h. 29

¹⁸ Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 27

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 ayat (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹⁹

Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2)).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).

¹⁹ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 49.

4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat (1)).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)).

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.²⁰ Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringannya terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHAP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut.

Di samping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap yaitu:

²⁰Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 361.

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.
2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya campur tangan

dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.²¹ Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam membuat suatu putusan terhadap perkara penganiayaan banyak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang ada dan tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi.²²

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab sudah merupakan suatu kewajiban menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 disebutkan:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²¹Lilik Mulyadi 1, Op. Cit., h. 75.

²²Hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Militer tanggal 27 April 2010.

- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim dalam memeriksa perkara diakhiri dengan putusan. Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya.

Menurut Rusli Muhammad putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti.

Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.²³ Pasal 1 butir 11 KUHP menyatakan: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

1.5.4.1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan

Pertimbangan hukum hakim pengadilan militer sebelum menjatuhkan putusan tidak bedanya dengan pertimbangan hukum pada peradilan umum yang memeriksa perkara pidana. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan

²³ Rusli Muhammad, Op.Cit. h. 115.

yang mengandung pembedaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²⁴

Hal-hal yang memberatkan:

1. Program pemerintah memerangi penganiayaan.
2. Bisa meresahkan masyarakat dan sebagainya.
3. Menghancurkan masa depan bangsa.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan di pengadilan.

2.2.1. Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Serta Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Penjatuhan Pidana

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan penganiayaan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

²⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer, tanggal 27 April 2012.

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

ad.a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP)).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.²⁵ Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai penganiayaan ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan

²⁵ Rusli Muhammad, Op. Cit., h. 125.

atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

ad.b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.²⁶

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan pasal 145 KUHAP dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar,

²⁶ SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 75.

dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu.

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Dari sepuluh putusan hakim yang diteliti oleh penulis semuanya mempertimbangkan keterangan saksi.

ad.c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.²⁷ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan bahan

²⁷ Pasal 189 KUHAP.

pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Dari 10 (sepuluh) putusan yang diteliti semuanya mempertimbangkan keterangan terdakwa.

ad.d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:²⁸

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian

²⁸ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.²⁹

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tetapi walaupun demikian, dari sepuluh putusan yang diteliti oleh penulis, ada satu putusan yang tidak mempertimbangkan barang bukti dalam putusannya.

ad.e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang penganiayaan yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

²⁹ Pasal 181 ayat (13) KUHP.

b. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

1. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan penganiayaan sudah barang tentu membawa akibat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga korban juga berakibat buruk kepada masyarakat luas. Seperti yang sudah dikemukakan penulis pada awal tulisan ini dampak dari penyalahgunaan penganiayaan ini sangat menakutkan sampai-sampai bisa menghilangkan generasi suatu bangsa (lost generation). Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Mungkin karena begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan hakim mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

2. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan

adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan sebagainya. Bila perlu hukuman untuk penegak hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan lebih berat daripada hukuman terhadap masyarakat biasa.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus pula disertakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana, bahwa dalam pertimbangannya salah satunya yaitu harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang penganiayaan yang dilanggar oleh terdakwa. tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum sebagaimana pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, apabila putusan yang dijatuhkan ternyata tidak mencatumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan terdakwa, maka menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan tersebut tidak perlu dimohonkan pembatalan, melainkan batal dengan sendirinya dalam arti putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang sipil. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, terdapat peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang mengaturnya. Hal ini karena ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain dari pada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

1. Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;
2. Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan-jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran-jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai tempat berlakunya ketentuan pidana (dalam perundang-undangan) yang diatur dalam KUHP, ternyata di KUHP Militer diperluas bagi seorang militer. Perluasan tempat tersebut dikaitkan dengan beradanya seseorang militer di luar Indonesia dalam dua hal, yaitu:

1. beradanya ia di tempat itu di dalam hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana, atau
2. beradanya ia di tempat itu di luar hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana tertentu;

Pengertian di luar Indonesia adalah lebih luas dari pada di luar negeri. Di luar Indonesia berarti di suatu tempat yang tidak termasuk wilayah Indonesia. Tidak menjadi persoalan apakah tempat/daerah itu “bertuan” atau “tak bertuan” (misalnya: Lautan bebas). Bilamana ia di suatu daerah yang tidak dikuasai oleh suatu hukum/negara, melakukan suatu kejahatan, tidak banyak persoalan mengenai penerapan hukum Indonesia baginya. Tetapi bila dilakukan di luar negeri di mana hukum “luar negeri” itu mengikat setiap orang di Negeri tersebut termasuk oknum-oknum militer kita yang sedang berada di situ, dapat dipersoalkan mengenai hukum mana yang akan diterapkan.

Diadakannya ketentuan pasal 4, tidak dimaksudkan supaya Militer/TNI tersebut tidak mengakui kekuatan mengikat dari hukum negara di mana ia berada. Maksud utama dari pasal 4 ialah agar hakim militer Indonesia, dapat menerapkan undang-undang hukum pidana kepada Militer/TNI tersebut. Selanjutnya dimaksudkan pula agar hakim-hakim militer Indonesia, dapat menerapkan undang-undang hukum pidana kepada Militer/TNI tersebut.

Selanjutnya dimaksudkan pula agar hakim-hakim militer Indonesia pada suatu mahkamah militer Indonesia apabila sedang bertugas di luar Indonesia (misalnya sebagai suatu bagian dari induk pasukan yang ditugaskan

di luar negeri) dapat menjalankan tugasnya sebagai hakim militer Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Bahwa seseorang militer selalu membawa hukum (negaranya) ke manapun ia pergi. Titik berat untuk menentukan batas-batas berlakunya ketentuan pidana Indonesia bagi seseorang militer Indonesia adalah pribadi (persoon) dari militer tersebut. Asas yang digunakan adalah asas personalitas. Apakah negara asing tersebut akan menggunakan wewenangnya untuk mengadili perkara militer tersebut. Asas yang digunakan adalah asas personalitas. Apakah negara asing tersebut akan menggunakan wewenangnya untuk mengadili perkara militer kita itu sepenuhnya, tergantung kepada mereka. Dalam hal mereka menggunakan wewenang tersebut, dalam pasal 76 KUHP berlaku asas non bis in idem. Dan apabila misalnya hanya di “persona non grata” kan saja, maka ketentuan pasal 4 dapat diterapkan oleh badan-badan peradilan militer Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan militer yang menjatuhkan putusan atas kasus penganiayaan yang dilakukan sesama anggota adalah pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, namun ada ketentuan khusus jika KUHP Militer mengatur tersendiri.

1.5.4.2. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, bahwa putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan (atau tindak pidana umumnya) dapat

dijatuhkan karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.³⁰ Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.³¹ Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan .Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:³²

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai

³⁰Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Penganiayaan Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007, h. 323.

³¹ Lilik Mulyadi 1, Op.Cit. hal. 217.

³² Martiman Prodjohamidjojo, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 15.

keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: Alat bukti

yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

1.5.4.2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: .Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut

perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:³³

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya.
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*).
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedarjo³⁴ dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Menurut Pasal 67 KUHP lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan

³³ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* h. 117-118.

³⁴ Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, h. 58.

pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum tidak berhak minta banding.

Di atas telah dijelaskan bahwa pelepasan dari segala tuntutan hukum dibenarkan oleh hukum apabila seseorang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah. Tetapi tidak semua perintah yang diberikan oleh atasan bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menempatkan perintah atasan pada hal-hal yang meringankan saja. Karena sesuai fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

1.5.4.3. Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan³⁵. Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut

³⁵ Pasal 183 KUHP.

tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu³⁶. Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.³⁷

³⁶ Pasal 193 ayat (2) KUHAP

³⁷ Ibid.

1.6.2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pendekatannya dilakukan secara conceptual approach dan statute approach.³⁸ Conceptual approach artinya pendekatan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum. Sedangkan Statute approach artinya pendekatan terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Untuk menunjang dan melengkapi data maka dilakukan penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh data primer.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHP, Kitan Undang-

³⁸Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-6, Jakarta, 2010, h. 93-119.

Undang Hukum Pidana Militer. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana, serta wawancara atau pengambilan bahan/data secara langsung di Pengadilan Militer Surabaya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat

khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.³⁹

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika dalam Skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang tepat dan teratur, Proposal Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai Skripsi ini dapat dilihat pada Sistematika sebagai berikut :

Bab pertama tentang Pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Dengan latar belakang masalah akan kita ketahui tentang permasalahan yang dikaji, yang diletakan pada rumusan permasalahan.

Bab kedua menjawab permasalahan yang pertama yakni mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan militer yang menjatuhkan putusan atas kasus penganiayaan yang dilakukan sesama anggota. Dalam bab dua ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni pertama mengenai Pertimbangan Hakim secara Internal, kedua mengenai pertimbangan hakim secara eksternal dan ketiga Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kasus Putusan Nomor: PUT/ 215 – K / PM.III - 12 / AL /XI / 2009).

Bab Ketiga menjawab permasalahan kedua yakni mengenai upaya hukum apakah yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

³⁹ Ibid.

Bab ketiga ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni pertama mengenai upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan tuntutanannya, kedua mengenai upaya hakim yang paling tepat sesuai kasus putusan nomor: PUT/ 215 – K / PM.III - 12 / AL /XI / 2009).